BAB I
PENDAHULUAN

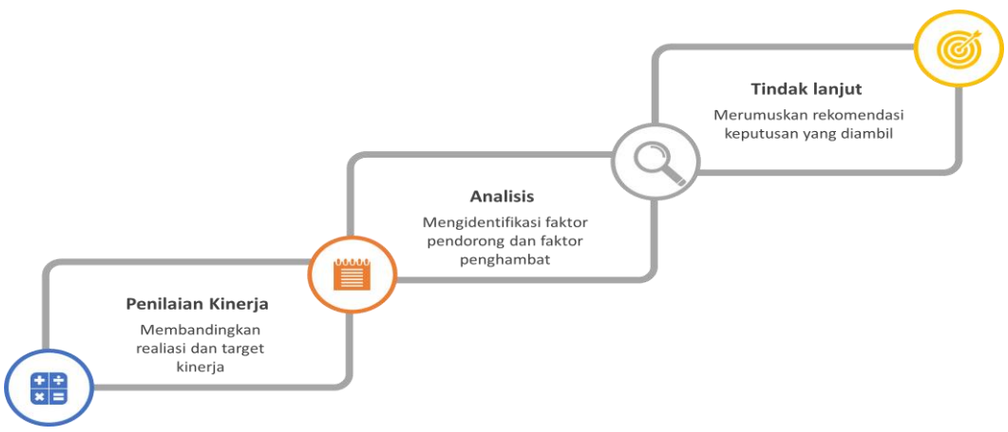
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.

.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

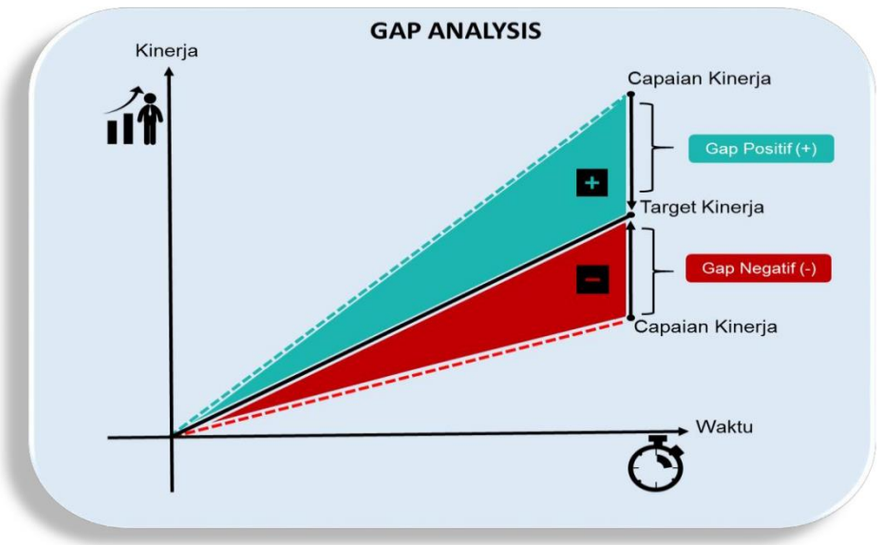
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



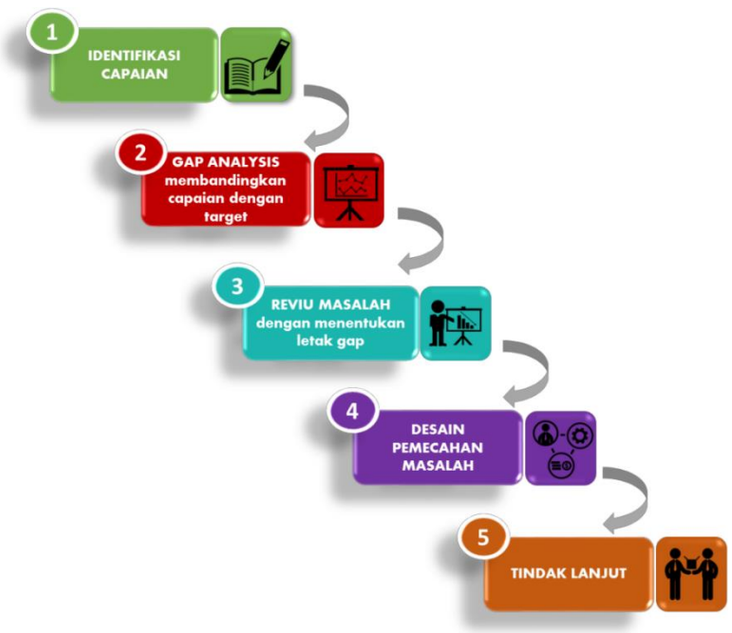
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan

penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamata	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	81,97	0	0 %
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN0	89	98,25	110
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	18	0 %	0 %

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Ngronggot adalah belum ada

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 98,25 % sampai Tri Bulan I dari target sebesar 89,00 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Ngronggot melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 98,99 %.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Ngronggot sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 99,49 %.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 98,74%.
4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Ngronggot tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100,75 %.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Ngronggot antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 100.75 %.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 100,5 %.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan mencapai 100 %.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 100 %.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ngronggot sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 100,75 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngronggot diatas Penangananan Pengaduan/U8, Biaya yang Gratis/U4 dan Kompetesi Pelakasana/U6 memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Ngronggot sampai akhit Tti Bulan I Tahun 2025 mencapai 98,25 %.

C. Sasaran strtegis yang kedua

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan, Belum tercapai dari target.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	***75.90***	0	0 %
	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perancanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	5 Dokumen	2 Dokumen	40 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	2 Laporan	40 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***3 Dokumen***	3 Dokumen	!00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	10 Orang/Bulan	66,6 %
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Koordinasi dan penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula	Jumalh Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	3 Laporan	1Laporan	33,3 %

	nan/ Semesteran SKPD	Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah***	***2 Dokumen***	0	0 %
	Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0 %
	Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyususnan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1 Laporan**	0	0 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**1 Dokumen**	0	0 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	**1 Paket**	0	0 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**6 Dokumen**	1 Dok	16,6 %
	Penyediaan komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	**1 Paket**	0	0 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	**1 Paket**	0,094	09,4%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**1 Pket**	0,083	8,3 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**1 Paket**	0,149	14,9 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	*Jumalh Dokumen Bahan Bacaan an Peraturan Perundang Undangan yang disediakan*	**2 Dokumen**	1	50,%
	Penyelenggaraan	*Jumlah Laporan*	**2**	1	50 %

	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	**Laporan**		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkar Daerah yang disediakan***	***4 Unit***	0	0 %
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	**2 Unit**	0	0 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	**2 Unit**	0	0,%
	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**12 Laporan**	3 Laporan	40 %
	Penyediaan Jasa surat menyurat	*Jumlah Laporan Peyediaan Jasa surat menyurat*	**12 Laporan**	0	0 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	*Peyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	**12 Laporan**	3 Laporan	40 %
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	**8 Unit**	0	0 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	**3 Unit**	2 Unit	66 %
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang dipelihara*	**2 Unit**	0	0 %
	Pemeliharaan peralatan dan mesin launnya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	**3 Unit**	1 Unit	33,33 %
	Program Penyelenggaraa	**Persentase kegiatan pemerintahan dan**	**90 %**	0	0 %

	n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**			
	Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	***Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan***	**6 Lapora n**	0	0 %
	Koordinasi/Siner gi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi denganInstansi Vertikal terkait*	**6 Lapora n**	0	0 %
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah laporan Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**3 Lapora n**	0	0 %
	Koordinasi / Sinergi dengan perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana Prasarana pelayanan Umum*	**3 Lapora n**	0	0 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat***	**3 Lapora n**	0	0 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenanga lain yang dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan*	**3 Lapora n**	0	0 %
	Program Pemberdayaan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan**	**90 %**	100 %	111%

	Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Ngronggot**			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	**91 Lembaga**	91 Lembaga	100 %
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Desa*	**91 Lembaga**	91 Lembaga	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan*	**26 Dokumen**	0 dok	0 %
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**	**90 %**	0	0%
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah laporan Hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**1 Laporan**	0	0 %
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wlayah Indonesia*	**1 Laporan**	0	0 %
	Harmonisasi Hubungan Tokoh	*Jumlah Lapran Pelaksanaan*	**2**	0	0 %

	agama dan Tokoh Masyarakat	*Harmionisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat*	**Laporan**		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah	***Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	**1 Laporan**	0	0 %
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	**1 Laporan**	0	0 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**90 %**	0	0 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**78 Lembaga**	0	0 %
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan*	**65 Orang**	0	0 %

	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	**12 Dokumen**	0	0 %
	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa /Kelurahan Cepat berkembang**	**90 %**	0	0 %
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang***	**13 Desa**	0	0 %
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	**3 Dokumen**	0	0 %
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Desa*	**3 Dokumen**	0	0 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum*	**2 Dokumen**	0	0 %

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota dari Target 75,9 % realisasi 0 % disebabkan Nilai Sakip belum ada
   Adapun kegiatan dari program pennujang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain
   a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
      Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik taget 90 % realisasi 0 %
   Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik antara lain :
   a. Koordinasi Penyelenggaran kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat
   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan
3. Program Pemberdayaan masyarakat desa realiasai 100 %dari target 90 % maka capaian kinerjanya 111 % Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan
   Adapun Kegiatanya dari Program Pemberdayaan masyarakat desa yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai 100 %

4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum dari target 90 % realisasinya 0 % sehingga capaian kinerjanya 0 %
   Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah

Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot pada Tri Bulan I Tahun 2024 dari target 90 % dan terealisasi 0 % , halini menunjukkan capaian kinerja sebesar 0 %
   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu
   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dari tanget 78 Lembaga terealisasi 0 % menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Ngronggot sebesar 0 %

   Hal ini menunjukan kegiatan ini Belem tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Telah tercapai 0 % dari target 90 %
   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 13 Desa realisasi sebesar 0 hal ini menunjukan capaian keinerja sebesar 0 %

   Hal ini menunjukan kegiatan ini Belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot	1. Kurangnya Sumberdaya seperti personel dapat menghambat kemampuan kecamatan untuk bekerja sama
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbatasnya personel dapat menghambat kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Sinergi dengan Kepolisian dan TNI	Kurangnya SDM

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan anggaran yang memadai untuk program penunjang akan menjadu pendorong utama	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	Kurangnya data atau informasi yang akurat dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepemimpinan yang intergritas dalam administrasi keuangan	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat

		membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan penggandaan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf yang terlatih dan professional dalam menangani kunjungan tamu	Tidak memiliki persiapan yang memadai untuk kunjungan tamu dapat menghambat pengalaman tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tujuan yang jelas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dapat menjadi pendorong	Kuragnya akses informasi yang relevan dapat menghambat pembahasan yang efektif
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penatausahaan arsip dinamis	Kurangnya kesadaran akan pentingnya penatausahaan arsip dinamis dapat menghambat praktik ini
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	-
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memahami kebutuhan yang	Kurangnya pemahaman tentang

		sesuai untuk meingkatkan efisiensi	teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Regulasi yang memungkinan investasi swasta dalam penyediaan layanan ini	Ketergantungan pada sumber daya alam seperti air atau energi dapat membuat layanan rentan terhadap perubahan kondisi alam
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Ketersediaan sumber daya manusia dan	-

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	finansial yang memadai	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Memahami bahwa kerja sama dengan instansi lain dapat	Koordinasi memerlukan waktu dan sumber daya dan

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	meningkatkan efisiensi dan efektivitas	kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	- Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kecamatan	- Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan desa	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Semangat kerja sama dari semua	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk

	ketentraman dan Ketertiban Umum	pihak yang terlibat	terkait
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk terkait
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	elatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Kerja Tribulan I Tahun 2025 Kecamatan Ngronggot, diharapakan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanaka dengan capaian kinerja danj Realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Kecamatan Ngronggot dalam pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut tudak lepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu memerlukan evaluasi berkala untuk memperoleh target yang diharapkan

IV.2. Tindak Lanjut

Dengan adanya evaluasi Rencana Kerja Triwulan I pada tahun 2025, maka dapat diketahui bahwa untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan khususnya pada target yang akan ditentukan agar lebih baik lagi sehingga dapat tepat sesuai dengan yang di inginkan. Dan untuk kegiatan yang belum terlaksana, maka akan segera dilaksanakan pada triwulan II secara maksimal.

Ngronggot, 21 Maret 2025

CAMAT NGRONGGOT



MOHAMAD MAKRUP,S.Sos

Pembina TK I

NIP 19690115 199003 1 008

LAPORAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIBULAN I TAHUN 2026

KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

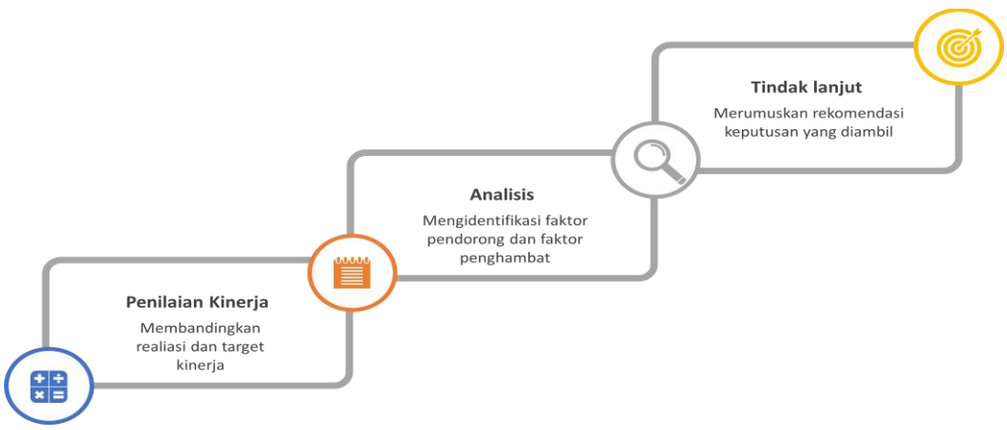
1.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah

terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2026.

.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

1.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

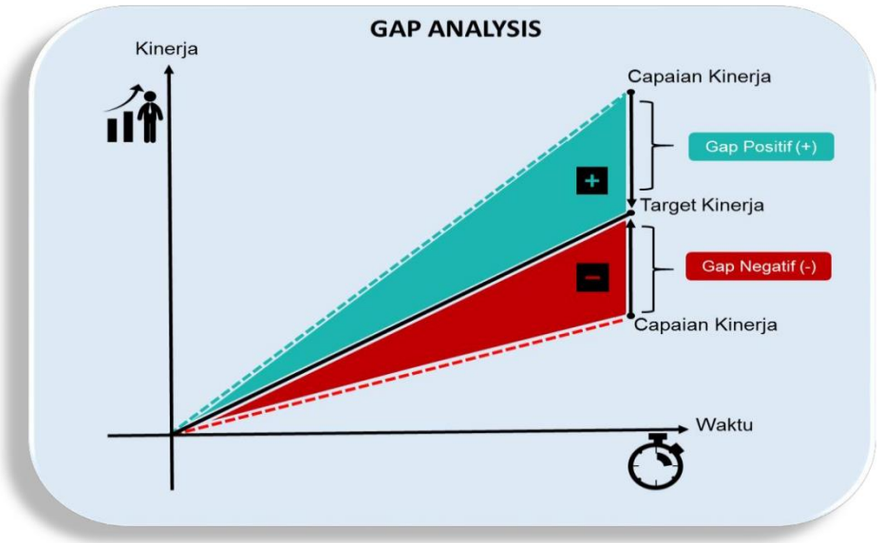
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



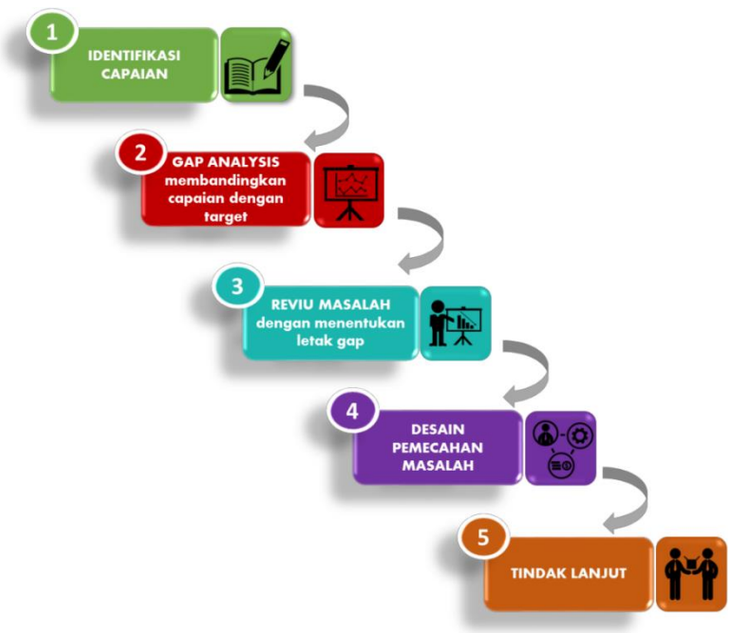
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan

penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 Sampai TW I Renstra 2024-2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	57	75,09	131,7 %
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85,84	99,7	116,1 %
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	18	32 %	413 %

2.1.2.Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 Sampai TW I Renstra 2025 – 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	57	75,09	131,7 %

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	85,84	98.64	114,9%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	18	20 %	111 %
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	80	23 %	28,75%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

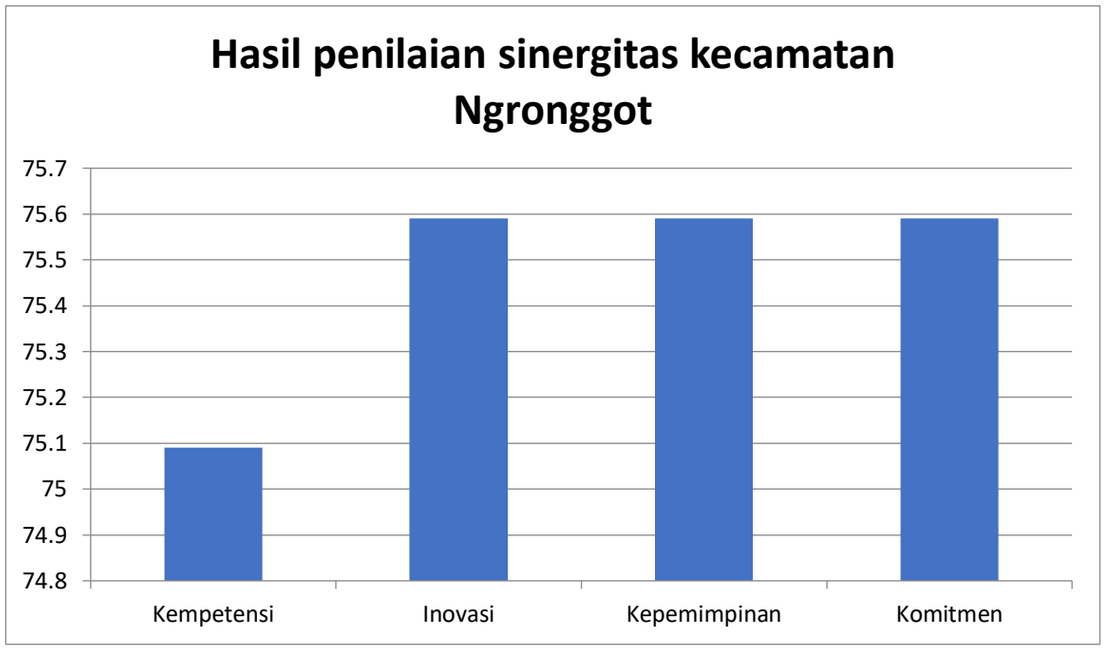
1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Ngronggot adalah 75.09 dengan rincian komponen sebagai berikut

Grafik 2.1



.

Berdasarkan grafik diatas dalam pelaksanaan sinergitas kecamatan Inovasi / Kreatifitas belum optimal. Hal ini dikarenakan SDM masih kurang

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 98,64 % sampai Tri Bulan IV dari target sebesar 85,84 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Ngronggot melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 99,38 %.

2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Ngronggot sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 99,44 %.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 99,19%.

4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Ngronggot tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100 %.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Ngronggot antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,56 %.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 99,69 %.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan mencapai 99,75 %.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 98,88 %.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ngronggot sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 99,88 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngronggot diatas , adapun 3 (tiga) unsur pelayanan yang berada pada posisi nilai terendah yaitu unsur Waktu /U3 dengan nilai 99,19 , Unsur Persyaratan (U1) dengan nilai 99,38 dan Unsur Prosedur (U2) dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 dengan realisasi 98,64 %. Dengan Mutu pelayanan A / sangat baik.

C. Sasaran strtegis yang kedua

C.1. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dari target. 18 % realisasi 20 % capaiannya 111 %

Perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024 – Tahun 2025}}{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{25 - 18}{25} \times 100\ \% = 20\ \%$$

2.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2026		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	***70.50***	**70.9**	**100,5 %**
	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perancanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	**5 Dok**	**5 Dok**	**100 %**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Lap	5 Lap	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat***	***3 Dok***	**3 Dok**	**100 %**

	Daerah	***Daerah***			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	11 Orang/Bulan	73%
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100 %
	Koordinasi dan penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumalh Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Lap	3 Lap	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah***	***2 Dok***	**2 Dok**	**100 %**
	Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2 Dok	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyususnan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**6 Dok**	**6 dok**	**100 %**
	Penyediaan komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Pket	1 paket	100 %
	Penyediaan	Jumlah Paket Barang	1	1 paket	100 %

	Barang Cetakan dan Penggandaan	dan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	*Jumalh Dokumen Bahan Bacaan an Peraturan Perundang Undangan yang disediakan*	2 Dok	2 Dok	100,%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Lap	2 Lap	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkar Daerah yang disediakan***	***4 Unit***	**4 Unit**	**100 %**
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	2 Unit	2 Unit	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	2 Unit	2 Unit	100,%
	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**12 Lap**	**12 Lap**	**100 %**
	Penyediaan Jasa surat menyurat	*Jumlah Laporan Peyediaan Jasa surat menyurat*	12 Lap	12 Lap	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	*Peyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	12 Lap	12 Lap	100 %
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	**8 Unit**	**8 Unit**	**100 %**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	3 Unit	3 Unit	100 %

	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang dipelihara*	2 Unit	2 Unit	100 %
	Pemeliharaan peralatan dan mesin launnya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	3 Unit	3 Unit	100 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**90 %**	**91,6 %**	**101 %**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	***Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan***	**6 Lap**	**6**	**100 %**
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi denganInstansi Vertikal terkait*	6 Lap	6	100 %
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah laporan Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**3 Lap**	**2 Lap**	**66,6 %**
	Koordinasi / Sinergi dengan perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana Prasarana pelayanan Umum*	3 Lap	2 Lap	66,6 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat***	**3 Lap**	**3 Lap**	**100 %**
	Pelaksanaan Urusan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan*	3 Lap	3 Lap	100 %

	Pemerintahan yang terkait dengan kewenanga lain yang dilimpahkan	*Kewenangan lain yang dilimpahkan*			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Ngronggot**	**90 %**	**100 %**	**111%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	**91 Lembaga**	**91 Lembaga**	**100 %**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Desa*	91 Lembaga	91 Lembaga	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan*	26 Dok	8 dok	30,76 %
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**	**90 %**	**90 %**	**100 %**
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah laporan Hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**1 Laporan**	**1 Lap**	**100 %**
	Sinergitas dengan Kepolisian	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara*	1 Laporan	1 Lap	100 %

	Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wlayah Indonesia*			
	Harmonisasi Hubungan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Lapran Pelaksanaan Harmionisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat*	2 Laporan	2 Lap	100 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah	***Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	**1 Lap**	**1 Lap**	**100 %**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Lap	1 Lap	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**90 %**	**83,3**	**92,5 %**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**78 Lembaga**	**65**	**83,3 %**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka*	65 Orang	65 Orang	100 %

	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dok	12 dok	100 %
	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa /Kelurahan Cepat berkembang**	**90 %**	**92,3**	**102,5 %**
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang***	**13 Desa**	**12 Desa**	**92,3 %**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	3 Dok	3 Dok	100 %
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Desa*	3 Dok	3 Dok	100 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentaraman dan*	2 Dokumen	1	50 %

		Ketertiban Umum			

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota dari Target 70,5 % realisasi 70,90 % .Capaiannya 100,5 %

   Adapun kegiatan dari program pennujang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain

   a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik taget 90 % realisasi 91,6 % Capaiannya 101 %

   Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik antara lain :

   a. Koordinasi Penyelenggaran kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

3. Program Pemberdayaan masyarakat desa realiasai 100 %dari target 90 % maka capaian kinerjanya 111 % Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

   Adapun Kegiatanya dari Program Pemberdayaan masyarakat desa yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai 100 %

4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum dari target 90 % realisasinya 90 % sehingga capaian kinerjanya 27,7 %

   Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
   2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot pada Tri Bulan IV Tahun 2025 dari target 90 % dan terealisasi 83,3 % , halini menunjukkan capaian kinerja sebesar 92,5 %

   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dari tanget 78 Lembaga terealisasi 65 % menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Ngronggot sebesar 83,3 % Hal ini menunjukan kegiatan ini Belem tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Telah tercapai 92,3 % dari target 90 %

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 13 Desa realisasi sebesar 12 Desa

   Hal ini menunjukan kegiatan ini tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot	1. Kurangnya Sumberdaya seperti kemampuan personel dapat menghambat kemampuan kecamatan untuk bekerja sama
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbatasnya personel dapat menghambat kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Sinergi dengan Kepolisian dan TNI	Kurangnya SDM

3.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan anggaran yang memadai untuk program penunjang akan menjadu pendorong utama	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	Kurangnya data atau informasi yang akurat dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepemimpinan yang intergritas dalam administrasi keuangan	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat

		membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan penggandaan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf yang terlatih dan professional dalam menangani kunjungan tamu	Tidak memiliki persiapan yang memadai untuk kunjungan tamu dapat menghambat pengalaman tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tujuan yang jelas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dapat menjadi pendorong	Kuragnya akses informasi yang relevan dapat menghambat pembahasan yang efektif
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penatausahaan arsip dinamis	Kurangnya kesadaran akan pentingnya penatausahaan arsip dinamis dapat menghambat praktik ini
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	-
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memahami kebutuhan yang	Kurangnya pemahaman tentang

		sesuai untuk meingkatkan efisiensi	teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Regulasi yang memungkinan investasi swasta dalam penyediaan layanan ini	Ketergantungan pada sumber daya alam seperti air atau energi dapat membuat layanan rentan terhadap perubahan kondisi alam
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Ketersediaan sumber daya manusia dan	-

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	finansial yang memadai	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Memahami bahwa kerja sama dengan instansi lain dapat	Koordinasi memerlukan waktu dan sumber daya dan

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	meningkatkan efisiensi dan efektivitas	kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kecamatan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan desa	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Semangat kerja sama dari semua	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk

	ketentraman dan Ketertiban Umum	pihak yang terlibat	terkait
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk terkait
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal	Adanya Efisiensi Anggaran

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Kerja Tribulan I Tahun 2026 Kecamatan Ngronggot, diharapakan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanaka dengan capaian kinerja danj Realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Kecamatan Ngronggot dalam pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut tudak lepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu memerlukan evaluasi berkala untuk memperoleh target yang diharapkan

4.2. Tindak Lanjut

Dengan adanya evaluasi Rencana Kerja Triwulan I pada tahun 2026, maka dapat diketahui bahwa untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan khususnya pada target yang akan ditentukan agar lebih baik lagi sehingga dapat tepat sesuai dengan yang di inginkan.

Ngronggot, 2 April 2026

CAMAT NGRONGGOT

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP,S.Sos

Pembina TK I

NIP 19690115 199003 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

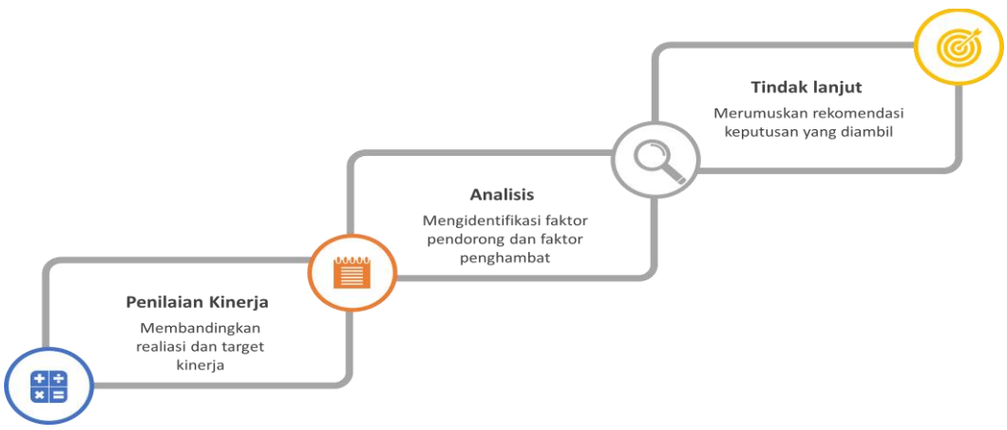
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah

terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.

.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

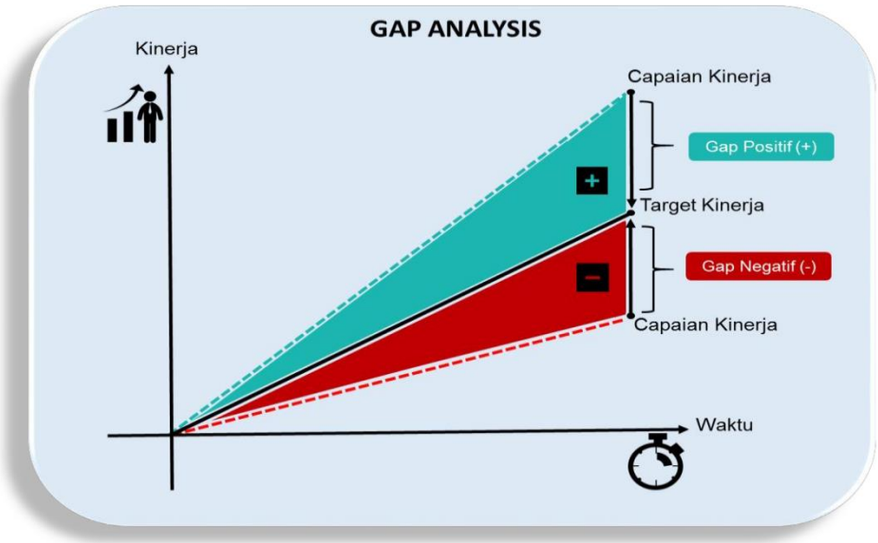
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



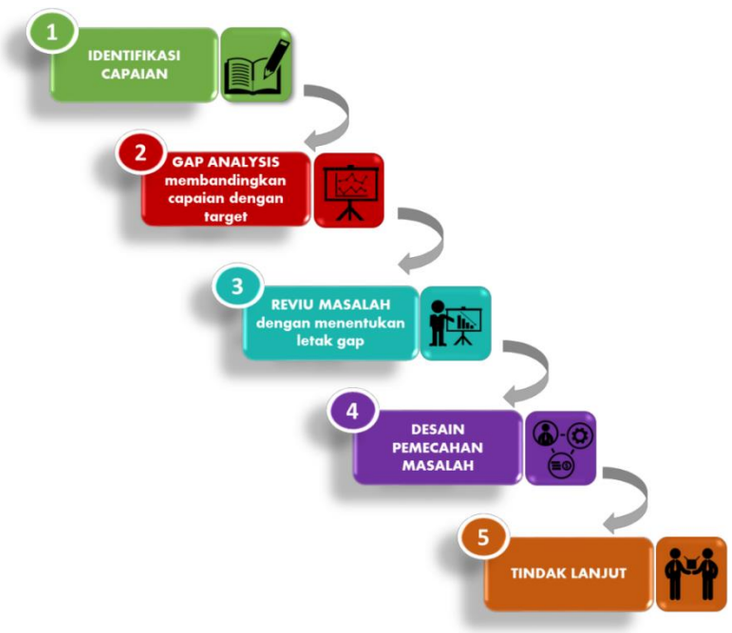
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan

penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamata	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	81,97	0	0 %
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN0	85,4	98,52	115,3 %
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	18	80 %	448 %

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

   Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

   1. Kompetensi
   2. Inovasi/kreatifitas
   3. Kepemimpinan
   4. Kinerja/Komitmen

      Hasil penilaian sinergitas kecamatan Ngronggot adalah belum ada

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 98,52 % sampai Tri Bulan II dari target sebesar 85,4 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Ngronggot melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 99,13 %.

2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Ngronggot sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 98,78 %.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 100%.

4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Ngronggot tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 99,65 %.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Ngronggot antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,83 %.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 99,48 %.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan mencapai 99,48 %.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 99,65 %.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ngronggot sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 100 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngronggot diatas Penangananan Pengaduan/U8, Biaya yang Gratis/U4 dan Kompetesi Pelakasana/U6 memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan Demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Ngronggot sampai akhit Tti Bulan II Tahun 2025 mencapai 98,52 %.

C. Sasaran strtegis yang kedua

Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dari target. 18 % realisasi 80.6 % capaiannya 448 %

Perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024 – Tahun 2025 s/d TW II}}{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{31 - 6}{31} \text{ X 100 \% = 80 \%}$$

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	***75.90***	70.10	92,35 %
	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perancanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	5 Dokumen	3 Dokumen	60 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	3 Laporan	60 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***3 Dokumen***	3 Dokumen	!00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	10 Orang/Bulan	66,6 %
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %

	Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumalh Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah***	***2 Dokumen***	2	100 %
	Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyususnan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1 Laporan**	1	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**1 Dokumen**	0	0 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	**1 Paket**	0	0 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**6 Dokumen**	5 dok	16,6 %
	Penyediaan komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	**1 Paket**	0	0 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	**1 Paket**	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**1 Pket**	1 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan dan	**1 Paket**	1 paket	100 %

	dan Penggandaan	Penggandaan yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	*Jumalh Dokumen Bahan Bacaan an Peraturan Perundang Undangan yang disediakan*	**2 Dokumen**	1	50,%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	**2 Laporan**	2 Lap	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkar Daerah yang disediakan***	***4 Unit***	0	0 %
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	**2 Unit**	0	0 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	**2 Unit**	0	0,%
	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**12 Laporan**	6Laporan	40 %
	Penyediaan Jasa surat menyurat	*Jumlah Laporan Peyediaan Jasa surat menyurat*	**12 Laporan**	6 Lap	0 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	*Peyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	**12 Laporan**	6 Laporan	50 %
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	**8 Unit**	6 Unit	75 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	**3 Unit**	3 Unit	100 %
	Pemeliharaan	*Jumlah Mebel yang*	**2 Unit**	0	0 %

	Mebel	*dipelihara*			
	Pemeliharaan peralatan dan mesin launnya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	**3 Unit**	3 Unit	100 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**90 %**	50	0 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	***Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan***	**6 Laporan**	3	0 %
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi denganInstansi Vertikal terkait*	**6 Laporan**	3	0 %
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah laporan Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**3 Laporan**	1	0 %
	Koordinasi / Sinergi dengan perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana Prasarana pelayanan Umum*	**3 Laporan**	1	0 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat***	**3 Laporan**	2	0 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang*	**3 Laporan**	2	0 %

	yang terkait dengan kewenanga lain yang dilimpahkan	*dilimpahkan*			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Ngronggot**	**90 %**	100 %	111%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	**91 Lembaga**	91 Lembaga	100 %
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Desa*	**91 Lembaga**	91 Lembaga	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan*	**26 Dokumen**	2 dok	0,76 %
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**	**90 %**	25	27,7%
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah laporan Hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**1 Laporan**	1	0 %
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,*	**1 Laporan**	1	0 %

	Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wlayah Indonesia*			
	Harmonisasi Hubungan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Lapran Pelaksanaan Harmionisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat*	**2 Laporan**	0	0 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah	***Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	**1 Laporan**	0	0 %
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	**1 Laporan**	0	0 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**90 %**	0	0 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**78 Lembaga**	0	0 %
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan*	**65 Orang**	0	0 %

	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	**12 Dokumen**	6 dok	0 %
	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa /Kelurahan Cepat berkembang**	**90 %**	84,61	94 %
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang***	**13 Desa**	13	0 %
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	**3 Dokumen**	1	0 %
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Desa*	**3 Dokumen**	1	0 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum*	**2 Dokumen**	0	0 %

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota dari Target 75,9 % realisasi 7010 % .

   Adapun kegiatan dari program pennujang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain

   a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

      Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik taget 90 % realisasi 50 %

   Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik antara lain :

   a. Koordinasi Penyelenggaran kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

3. Program Pemberdayaan masyarakat desa realiasai 100 %dari target 90 % maka capaian kinerjanya 111 % Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

   Adapun Kegiatanya dari Program Pemberdayaan masyarakat desa yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai 100 %

4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum dari target 90 % realisasinya 25 % sehingga capaian kinerjanya 0 %

   Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
   2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot pada Tri Bulan II Tahun 2025 dari target 90 % dan terealisasi 0 % , halini menunjukkan capaian kinerja sebesar 0 %

   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dari tanget 78 Lembaga terealisasi 0 % menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Ngronggot sebesar 0 %

   Hal ini menunjukan kegiatan ini Belem tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Telah tercapai 84 % dari target 94 %

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 13 Desa realisasi sebesar 13 hal ini menunjukan capaian keinerja sebesar 100 %

   Hal ini menunjukan kegiatan ini tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot	1. Kurangnya Sumberdaya seperti kemampuan personel dapat menghambat kemampuan kecamatan untuk bekerja sama
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbatasnya personel dapat menghambat kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Sinergi dengan Kepolisian dan TNI	Kurangnya SDM

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan anggaran yang memadai untuk program penunjang akan menjadu pendorong utama	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	Kurangnya data atau informasi yang akurat dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepemimpinan yang intergritas dalam administrasi keuangan	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan

		mencukupi untuk membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	tepat waktu, ini dapat menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses

		penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf yang terlatih dan professional dalam menangani kunjungan tamu	Tidak memiliki persiapan yang memadai untuk kunjungan tamu dapat menghambat pengalaman tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tujuan yang jelas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dapat menjadi pendorong	Kuragnya akses informasi yang relevan dapat menghambat pembahasan yang efektif
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penatausahaan arsip dinamis	Kurangnya kesadaran akan pentingnya penatausahaan arsip dinamis dapat menghambat praktik ini
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	-
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan	Memahami	Kurangnya

	Mesin Lainnya	kebutuhan yang sesuai untuk meingkatkan efisiensi	pemahaman tentang teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Regulasi yang memungkinan investasi swasta dalam penyediaan layanan ini	Ketergantungan pada sumber daya alam seperti air atau energi dapat membuat layanan rentan terhadap perubahan kondisi alam
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Ketersediaan sumber daya	-

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	manusia dan finansial yang memadai	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Memahami bahwa kerja sama dengan	Koordinasi memerlukan waktu

	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	instansi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas	dan sumber daya dan kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	- Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau	- Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi

		kecamatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan desa	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya	Semangat kerja	Kurangnya Koordinasi

	Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	sama dari semua pihak yang terlibat	PPTK dengan pihalk terkait
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk terkait
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab

	Republik Indonesia		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	elatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Kerja Tribulan II Tahun 2025 Kecamatan Ngronggot, diharapakan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan

yang telah dilaksanaka dengan capaian kinerja danj Realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Kecamatan Ngronggot dalam pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut tudak lepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu memerlukan evaluasi berkala untuk memperoleh target yang diharapkan

IV.2. Tindak Lanjut

Dengan adanya evaluasi Rencana Kerja Triwulan II pada tahun 2025, maka dapat diketahui bahwa untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan khususnya pada target yang akan ditentukan agar lebih baik lagi sehingga dapat tepat sesuai dengan yang di inginkan. Dan untuk kegiatan yang belum terlaksana, maka akan segera dilaksanakan pada triwulan II secara maksimal.

Ngronggot, Juli 2025

CAMAT NGRONGGOT

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP,S.Sos

Pembina TK I

NIP 19690115 199003 1 008

BAB I
PENDAHULUAN

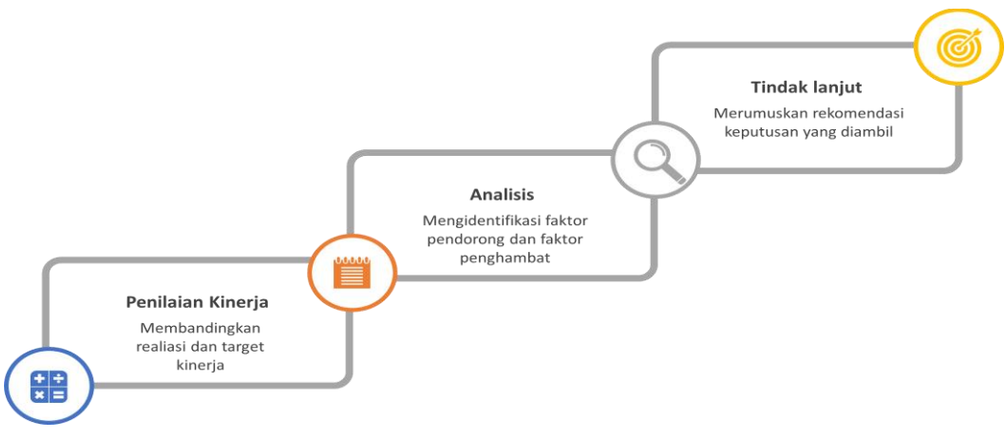
1.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah

terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.

.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

1.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

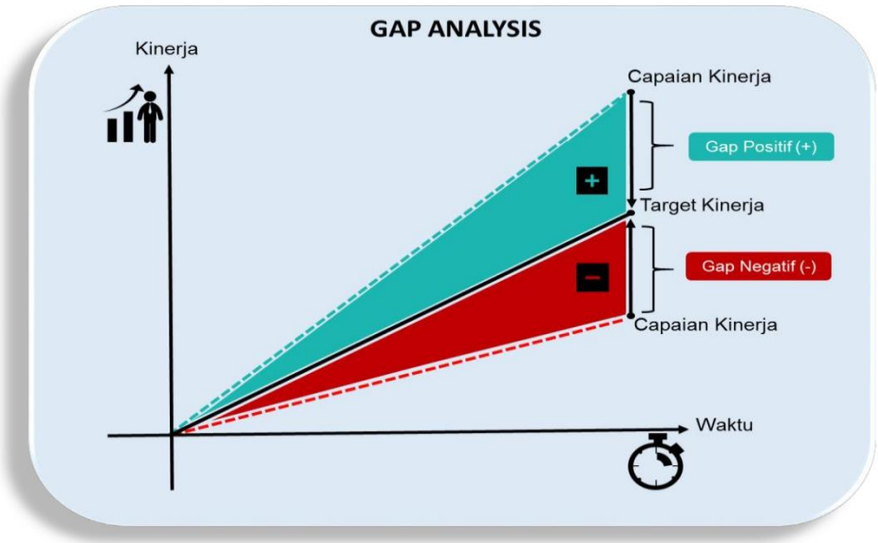
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



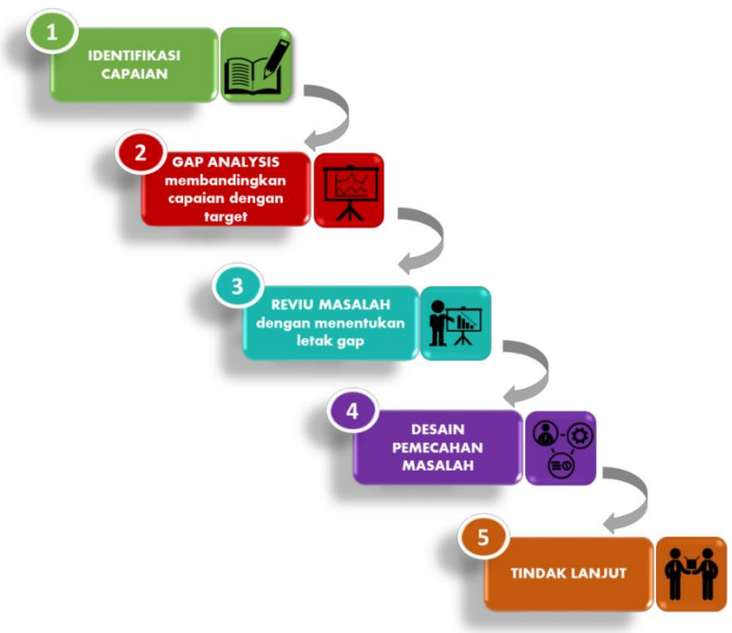
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan

penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamata	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	57	0	0 %
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN0	85,84	99,7	116,1 %
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	18	74,2 %	413 %

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Ngronggot adalah belum ada

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 99,7 % sampai Tri Bulan III dari target sebesar 85,84 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Ngronggot melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 99,53 %.
2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Ngronggot sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 99,65 %.
3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 99,41%.
4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Ngronggot tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100 %.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Ngronggot antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,53 %.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 99,53 %.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan mencapai 99,88 %.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 100 %.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ngronggot sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 99,76 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngronggot diatas , Biaya yang Gratis/U4 dan 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8) memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Ngronggot sampai akhit Tti Bulan III Tahun 2025 dengan realisasi 99,7 %. Dengan Mutu pelayanan A / sangat baik.

C. Sasaran strtegis yang kedua

Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dari target. 18 % realisasi 74,2 % capaiannya 413 %

Perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024} - \text{Tahun 2025 s/d TW III}}{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{31 - 8}{31} \text{ X 100 \% = 74,2 \%}$$

2.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	***70.50***	70.9	100,5 %
	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perancanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	5 Dokumen	4 Dokumen	80 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Laporan	4 Laporan	80 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***3 Dokumen***	3 Dokumen	!00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang dan yang menerima gaji dan	15 Oran	11	73%

	ASN	Tunjangan ASN	g/ bulan	Orang/Bulan	
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	Koordinasi dan penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumalh Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah***	***2 Dokumen***	2	100 %
	Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyususnan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**1 Laporan**	1	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**1 Dokumen**	0	0 %
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	**1 Paket**	0	0 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**6 Dokumen**	5 dok	83,3 %
	Penyediaan komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	**1 Paket**	0	0 %
	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	**1 Paket**	1 paket	100 %

	Rumah Tangga	disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	**1 Pket**	1 paket	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	**1 Paket**	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	*Jumalh Dokumen Bahan Bacaan an Peraturan Perundang Undangan yang disediakan*	**2 Dokumen**	1Dok	50,%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	**2 Laporan**	2 Lap	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkar Daerah yang disediakan***	***4 Unit***	1 Unit	25 %
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	**2 Unit**	0	0 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	**2 Unit**	1 Unit	50,%
	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**12 Laporan**	9 Laporan	75 %
	Penyediaan Jasa surat menyurat	*Jumlah Laporan Peyediaan Jasa surat menyurat*	**12 Laporan**	6 Lap	75 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	*Peyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	**12 Laporan**	3 Laporan	75 %
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	**8 Unit**	6 Unit	75 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan*	**3 Unit**	3 Unit	100 %

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*pajaknya*			
	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang dipelihara*	**2 Unit**	0	0 %
	Pemeliharaan peralatan dan mesin launnya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	**3 Unit**	3 Unit	100 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**90 %**	83 %	92,2 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	***Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan***	**6 Laporan**	5	83,3 %
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi denganInstansi Vertikal terkait*	**6 Laporan**	5	83,3 %
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah laporan Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**3 Laporan**	3	100 %
	Koordinasi / Sinergi dengan perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana Prasarana pelayanan Umum*	**3 Laporan**	3	100 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan	***Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang***	**3 Laporan**	2	66,6 %

	yang dilimpahkan kepada Camat	***dilimpahkan kepada Camat***			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenanga lain yang dilimpahkan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan*	**3 Laporan**	2	66,6 %
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Ngronggot**	**90 %**	100 %	111%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	**91 Lembaga**	91 Lembaga	100 %
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Desa*	**91 Lembaga**	91 Lembaga	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan*	**26 Dokumen**	6 dok	23 %
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**	**90 %**	25 %	27,7%
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman	***Jumlah laporan Hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan***	**1 Laporan**	1 Lap	100 %

	dan Ketertiban Umum	***Ketertiban Umum***			
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wlayah Indonesia*	**1 Laporan**	1 Lap	100 %
	Harmonisasi Hubungan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Lapran Pelaksanaan Harmionisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat*	**2 Laporan**	0	0 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah	***Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	**1 Laporan**	0	0 %
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	**1 Laporan**	0	0 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**90 %**	83,3	92,5 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**78 Lembaga**	65	83,3 %

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	**65 Orang**	65	100 %
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	**12 Dokumen**	6 dok	50 %
	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa /Kelurahan Cepat berkembang**	**90 %**	92,3	102,5 %
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang***	**13 Desa**	13	100 %
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	**3 Dokumen**	2	66,6 %
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Desa*	**3 Dokumen**	2	66,6 %

	Desa				
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum*	**2 Dokumen**	1	50 %

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota dari Target 70,5 % realisasi 70,90 % .Capaiannya 100,5 %

   Adapun kegiatan dari program pennujang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain

   a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik taget 90 % realisasi 83 % Capaiannya 92,2

   Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik antara lain :

   a. Koordinasi Penyelenggaran kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

3. Program Pemberdayaan masyarakat desa realiasai 100 %dari target 90 % maka capaian kinerjanya 111 % Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan
   Adapun Kegiatanya dari Program Pemberdayaan masyarakat desa yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai 100 %
4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum dari target 90 % realisasinya 25 % sehingga capaian kinerjanya 27,7 %
   Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
   2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan
5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot pada Tri Bulan III Tahun 2025 dari target 90 % dan terealisasi 83,3 % , halini menunjukkan capaian kinerja sebesar 92,5 %
   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dari tanget 78 Lembaga terealisasi 65 % menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Ngronggot sebesar 83,3 % Hal ini menunjukan kegiatan ini Belem tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Telah tercapai 92,3 % dari target 90 %
   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 13 Desa realisasi sebesar 13 hal ini menunjukan capaian keinerja sebesar 100 %

   Hal ini menunjukan kegiatan ini tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

BAB III

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot	1. Kurangnya Sumberdaya seperti kemampuan personel dapat menghambat kemampuan kecamatan untuk bekerja sama
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbatasnya personel dapat menghambat kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Sinergi dengan Kepolisian dan TNI	Kurangnya SDM

3.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan anggaran yang memadai untuk program penunjang akan menjadu pendorong utama	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	Kurangnya data atau informasi yang akurat dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepemimpinan yang intergritas dalam administrasi keuangan	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan

		mencukupi untuk membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	tepat waktu, ini dapat menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses

		penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf yang terlatih dan professional dalam menangani kunjungan tamu	Tidak memiliki persiapan yang memadai untuk kunjungan tamu dapat menghambat pengalaman tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tujuan yang jelas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dapat menjadi pendorong	Kuragnya akses informasi yang relevan dapat menghambat pembahasan yang efektif
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penatausahaan arsip dinamis	Kurangnya kesadaran akan pentingnya penatausahaan arsip dinamis dapat menghambat praktik ini
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	-
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan	Memahami	Kurangnya

	Mesin Lainnya	kebutuhan yang sesuai untuk meingkatkan efisiensi	pemahaman tentang teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Regulasi yang memungkinan investasi swasta dalam penyediaan layanan ini	Ketergantungan pada sumber daya alam seperti air atau energi dapat membuat layanan rentan terhadap perubahan kondisi alam
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Ketersediaan sumber daya	-

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	manusia dan finansial yang memadai	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan	Memahami bahwa kerja sama dengan	Koordinasi memerlukan waktu

	Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	instansi lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas	dan sumber daya dan kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	- Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau	- Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi

		kecamatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan desa	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya	Semangat kerja	Kurangnya Koordinasi

	Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	sama dari semua pihak yang terlibat	PPTK dengan pihalk terkait
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk terkait
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab

	Republik Indonesia		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	elatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Kerja Tribulan III Tahun 2025 Kecamatan Ngronggot, diharapakan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanaka dengan capaian kinerja danj Realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Kecamatan Ngronggot dalam pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut tudak lepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu memerlukan evaluasi berkala untuk memperoleh target yang diharapkan

4.2. Tindak Lanjut

Dengan adanya evaluasi Rencana Kerja Triwulan III pada tahun 2025, maka dapat diketahui bahwa untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan khususnya pada target yang akan ditentukan agar lebih baik lagi sehingga dapat tepat sesuai dengan yang di inginkan. Dan untuk kegiatan yang belum terlaksana, maka akan segera dilaksanakan pada Triwulan III secara maksimal.

Ngronggot, 06 Oktober 2025

CAMAT NGRONGGOT

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP,S.Sos

Pembina TK I

NIP 19690115 199003 1 008

LAPORAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIBULAN IV TAHUN 2025

KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK

BAB I
PENDAHULUAN

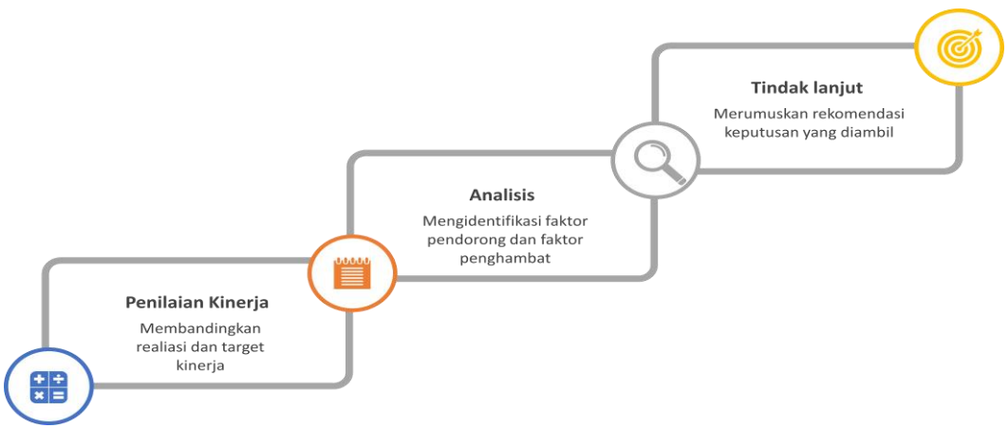
1.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah

terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025.

.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja

tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

1.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

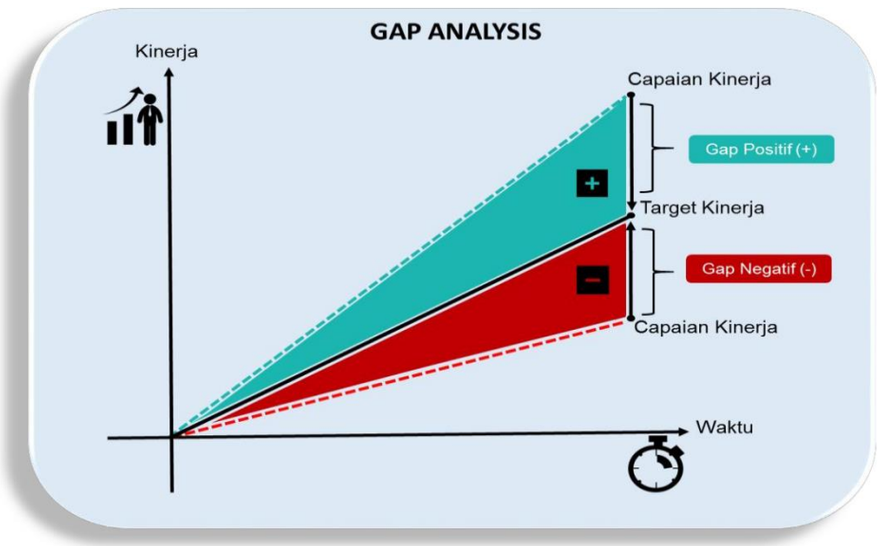
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



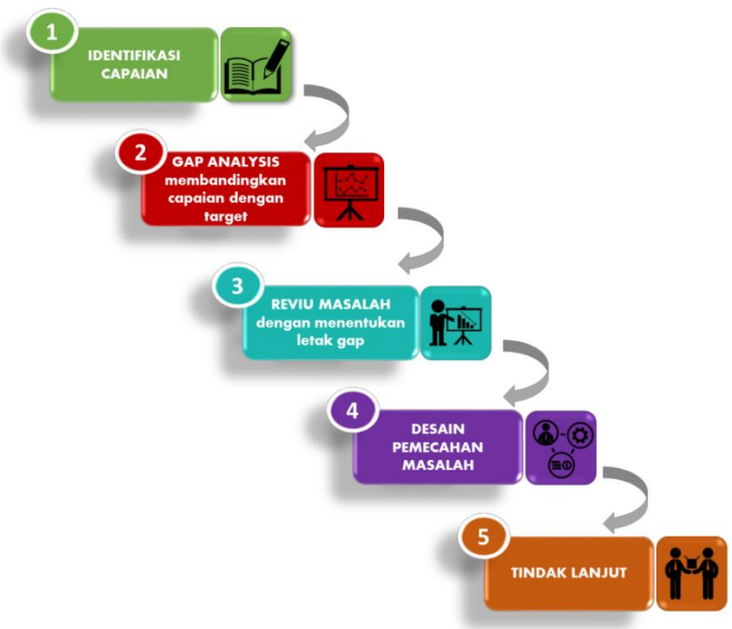
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan

penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagiannya.

BAB II

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai TW III Renstra 2024-2026 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	57	75,09	131,7 %
No	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85,84	99,7	116,1 %
2	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan	18	74,2 %	413 %

2.1.2.Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai TW IV Renstra 2025 – 2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	57	75,09	131,7 %

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	85,84	98.64	114,9%
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	18	20 %	111 %
3	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	80	23 %	28,75%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

A. Tujuan

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Penilaian sinergitas kecamatan memperhatikan aspek :

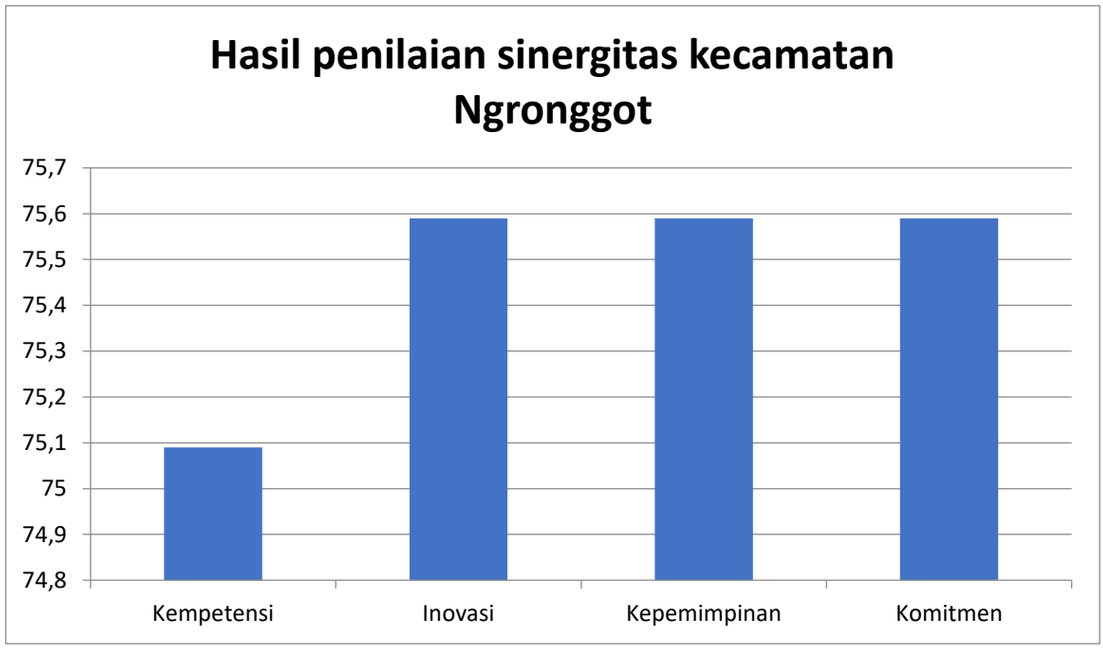
1. Aspek Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atributif
4. Aspek Pelaksanan Tugas Delegatif
5. Aspek inovasi/ kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan
7. Pelaksanaan Tugas Lainnya

Adapun indikator penilaiannya terbagi menjadi 4 (empat) komponen :

1. Kompetensi
2. Inovasi/kreatifitas
3. Kepemimpinan
4. Kinerja/Komitmen

Hasil penilaian sinergitas kecamatan Ngronggot adalah 75.09 dengan rincian komponen sebagai berikut

Grafik 2.1



.

Berdasarkan grafik diatas dalam pelaksanaan sinergitas kecamatan Inovasi / Kreatifitas belum optimal. Hal ini dikarenakan SDM masih kurang

B. Sasaran strtegis yang kesatu

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 98,64 % sampai Tri Bulan IV dari target sebesar 85,84 % . Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Ngronggot melebihi target :

1. Persyaratan (U1)

   Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku mencapai 99,38 %.

2. Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

   Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Ngronggot sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat mencapai 99,44 %.

3. Waktu Penyelesaian (U3)

   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan mencapai 99,19%.

4. Biaya/Tarif (U4)

   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Ngronggot tidak dikenakab biaya/gratis mencapai 100 %.

5. Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

   Jenis Pelayanan di Kecamatan Ngronggot antara lain :

   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 99,56 %.

6. Kompetensi Pelaksana (U6)

   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, mencapai 99,69 %.

7. Perilaku Pelaksana (U7)

   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan mencapai 99,75 %.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)

   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR mencapai 98,88 %.

9. Sarana dan Prasarana (U9);

   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Ngronggot sudah tersedia dengan kondisi yang baik mencapai 99,88 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngronggot diatas , adapun 3 (tiga) unsur pelayanan yang berada pada posisi nilai terendah yaitu unsur Waktu /U3 dengan nilai 99,19 , Unsur Persyaratan (U1) dengan nilai 99,38 dan Unsur Prosedur (U2) dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat. Dengan demikian secara keseluruhan IKM Kecamatan Ngronggot Tahun 2025 dengan realisasi 98,64 %. Dengan Mutu pelayanan A / sangat baik.

C. Sasaran strtegis yang kedua

C.1. Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kecamatan dari target. 18 % realisasi 20 % capaiannya 111 %

Perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024 – Tahun 2025}}{\sum \text{Kejadian gangguan Th 2024}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{25 - 18}{25} \text{ X 100 \% = 20 \%}$$

2.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut

No.	Program	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	***70.50***	**70.9**	**100,5 %**
	Perencanaan , penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perancanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun***	**5 Dok**	**5 Dok**	**100 %**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyususnan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	5 Lap	5 Lap	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat***	***3 Dok***	**3 Dok**	**100 %**

	Daerah	***Daerah***			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	11 Orang/Bulan	73%
	Koordinasi dan Penyususnan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	100 %
	Koordinasi dan penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumalh Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Lap	3 Lap	100 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah***	***2 Dok***	**2 Dok**	**100 %**
	Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok	2 Dok	100 %
	Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyususnan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap	2 Lap	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**6 Dok**	**6 dok**	**100 %**
	Penyediaan komponen InstalasiListrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 paket	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Pket	1 paket	100 %
	Penyediaan	Jumlah Paket Barang	1	1 paket	100 %

	Barang Cetakan dan Penggandaan	dan Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	*Jumalh Dokumen Bahan Bacaan an Peraturan Perundang Undangan yang disediakan*	2 Dok	2 Dok	100,%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2 Lap	2 Lap	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkar Daerah yang disediakan***	***4 Unit***	**4 Unit**	**100 %**
	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang disediakan*	2 Unit	2 Unit	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan*	2 Unit	2 Unit	100,%
	Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**12 Lap**	**12 Lap**	**100 %**
	Penyediaan Jasa surat menyurat	*Jumlah Laporan Peyediaan Jasa surat menyurat*	12 Lap	12 Lap	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	*Peyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan*	12 Lap	12 Lap	100 %
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	**8 Unit**	**8 Unit**	**100 %**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya*	3 Unit	3 Unit	100 %

	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang dipelihara*	2 Unit	2 Unit	100 %
	Pemeliharaan peralatan dan mesin launnya	*Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*	3 Unit	3 Unit	100 %
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**90 %**	**91,6 %**	**101 %**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	***Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan***	**6 Lap**	**6**	**100 %**
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi denganInstansi Vertikal terkait*	6 Lap	6	100 %
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	***Jumlah laporan Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum***	**3 Lap**	**2 Lap**	**66,6 %**
	Koordinasi / Sinergi dengan perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum	*Jumlah Dokumen Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana Prasarana pelayanan Umum*	3 Lap	2 Lap	66,6 %
	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	***Jumlah laporan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat***	**3 Lap**	**3 Lap**	**100 %**
	Pelaksanaan Urusan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan*	3 Lap	3 Lap	100 %

	Pemerintahan yang terkait dengan kewenanga lain yang dilimpahkan	*Kewenangan lain yang dilimpahkan*			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Ngronggot**	**90 %**	**100 %**	**111%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	***Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan***	**91 Lembaga**	**91 Lembaga**	**100 %**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dala Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawaran Perencanaan Pembangunan di Desa*	91 Lembaga	91 Lembaga	100 %
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kerja Kecamatan*	26 Dok	8 dok	30,76 %
	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	**Persentase permasalahan trantibum yang ditangani**	**90 %**	**90 %**	**100 %**
	Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	***Jumlah laporan Hasil koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum***	**1 Laporan**	**1 Lap**	**100 %**
	Sinergitas dengan Kepolisian	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara*	1 Laporan	1 Lap	100 %

	Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wlayah Indonesia*			
	Harmonisasi Hubungan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat	*Jumlah Lapran Pelaksanaan Harmionisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat*	2 Laporan	2 Lap	100 %
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah	***Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah***	**1 Lap**	**1 Lap**	**100 %**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*	1 Lap	1 Lap	100 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	***Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**90 %**	**83,3**	**92,5 %**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	***Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan***	**78 Lembaga**	**65**	**83,3 %**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka*	65 Orang	65 Orang	100 %

	rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	*Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*			
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*	12 Dok	12 dok	100 %
	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase Desa /Kelurahan Cepat berkembang**	**90 %**	**92,3**	**102,5 %**
	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	***Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang***	**13 Desa**	**12 Desa**	**92,3 %**
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	3 Dok	3 Dok	100 %
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaa Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Desa*	3 Dok	3 Dok	100 %
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentaraman dan*	2 Dokumen	1	50 %

		Ketertiban Umum			

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/Kota dari Target 70,5 % realisasi 70,90 % .Capaiannya 100,5 %

   Adapun kegiatan dari program pennujang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota antara lain

   a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Pengadaan Barang Milik Daerah
   f. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah
   g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik taget 90 % realisasi 91,6 % Capaiannya 101 %

   Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik antara lain :

   a. Koordinasi Penyelenggaran kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan umum
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

3. Program Pemberdayaan masyarakat desa realiasai 100 %dari target 90 % maka capaian kinerjanya 111 % Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

   Adapun Kegiatanya dari Program Pemberdayaan masyarakat desa yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa tercapai 100 %

4. Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum dari target 90 % realisasinya 90 % sehingga capaian kinerjanya 27,7 %

   Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
   2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah

   Hal ini menunjukan kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Ngronggot pada Tri Bulan IV Tahun 2025 dari target 90 % dan terealisasi 83,3 % , halini menunjukkan capaian kinerja sebesar 92,5 %

   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu

   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah dari tanget 78 Lembaga terealisasi 65 % menunjukkan capaian kinerja Kecamatan Ngronggot sebesar 83,3 % Hal ini menunjukan kegiatan ini Belem tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Telah tercapai 92,3 % dari target 90 %

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 13 Desa realisasi sebesar 12 Desa

   Hal ini menunjukan kegiatan ini tercapai sesuai dengan Target yang telah ditentukan

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Ngronggot	1. Kurangnya Sumberdaya seperti kemampuan personel dapat menghambat kemampuan kecamatan untuk bekerja sama
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Sarana dan Prasarana yang memadai	Terbatasnya personel dapat menghambat kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Sinergi dengan Kepolisian dan TNI	Kurangnya SDM

3.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Penyediaan anggaran yang memadai untuk program penunjang akan menjadu pendorong utama	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan	Kurangnya data atau informasi yang akurat dapat menghambbat perencanaan dan penganggaran yang efektif
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dapat meningkatkan koordinasi	Kesulitan dalam mengintergrasikan data dari berbagai sumber dapat menghambat penyusunan laporan yang akurat
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepemimpinan yang intergritas dalam administrasi keuangan	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk	Jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat

		membayar gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu	menghambat pembayaran gaji dan tunjangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Adanya pedoman yang jelas tentang format dan prosedur penyusun laporan	Kurangnya keterampilan teknis dalam penyusunan laporan keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepemimpinan yang mendukung dan mendorong SKPD untuk melaksanakan pelaporan secara teratur	Perubahan aturan atau kebijakan dapat mengganggu pelaporan berkala
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Transparansi dalam proses administrasi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kinerja	Penggunaan teknologi yang using atau tidak memadai dapat memperlambat proses administrasi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kerjasama yang baik dengan penyedia jasa instalasi listrik	Kesulitas teknis atau masalah dalam instalasi listrik dapat menghambat proses
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan yang baik untuk memastikan ketersediaan bahan logistic yang tepat pada waktunya	Masalah kualitas dan kesalahan dalam pesanan dapat menghambat operasi kantor
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Ketersediaan anggaran yang mencukupi untuk cetakan dan penggandaan	Ketidakjelasan dalam persyaratan pesanan atau spesifikasi dapat menghambat proses

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dukungan dari pimpinan untuk penyediaan bahan bacaan yang relevan	Keterlambatan dalam pengiriman bahan bacaan atau peratura perundang – undangan dapat menghambat kinerja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Staf yang terlatih dan professional dalam menangani kunjungan tamu	Tidak memiliki persiapan yang memadai untuk kunjungan tamu dapat menghambat pengalaman tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tujuan yang jelas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dapat menjadi pendorong	Kuragnya akses informasi yang relevan dapat menghambat pembahasan yang efektif
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Adanya kebijakan dan prosedur yang jelas untuk penatausahaan arsip dinamis	Kurangnya kesadaran akan pentingnya penatausahaan arsip dinamis dapat menghambat praktik ini
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Proses pengadaaan yang transparan dan sesuai peraturan dapat meningkatan efisiensi	-
	Pengadaan Mebel	Proses pengadaan yang kompetitif dapt menghasilkan harga yang lebih baik	Keterlambatan pengiriman mebel dapat mempengaruhi berjalannya operasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Memahami kebutuhan yang	Kurangnya pemahaman tentang

		sesuai untuk meingkatkan efisiensi	teknologi atau peralatan dapat menghambat pengadaan yang efisien
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan anggaran yang memadai dapat memungkinkan pemerintah daerah untuk menediakan layanan penunjang yang baik	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penggunaan teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa surat menyurat	Kurangnya pegawai terlatih dapat mengganggu layanan surat menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Regulasi yang memungkinan investasi swasta dalam penyediaan layanan ini	Ketergantungan pada sumber daya alam seperti air atau energi dapat membuat layanan rentan terhadap perubahan kondisi alam
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemantauan dan perencanaan pemeliharaan yang efektif dapat memperpanjang umur barang milik daerah	Kurangnya perawatan preventuf dapat menyebabkan barang milik daerah cepat rusak
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Ketersediaan sumber daya manusia dan	-

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	finansial yang memadai	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan terjadwal dan preventif yang baik dapat memperpanjang umur peralatan dan mesin	Kurangnya pemantauan dan perencanaan pemeliharaan dapat menyebabkan peralatan rusak lebih cepat
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perencanaan jangka Panjang yang memperhitungkan pemeliharaan dapat mencegah kerusakan lebih lanjut	Kurangnya anggaran dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemeliharaan atau rehabilitasi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Melibatkan Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan	Kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Menetapkan peran dan tanggngjawab dengan jelas bagi setiap instansi atau unit kerja dapat membantu koordinasi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Memahami bahwa kerja sama dengan instansi lain dapat	Koordinasi memerlukan waktu dan sumber daya dan

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	meningkatkan efisiensi dan efektivitas	kurangnya dukungan dalam hal ini dapat menghambat sinergi
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemanfaatan teknologi untuk pemantauan dan perawatan prasaran dapat meningkatkan efiseinsi	Belum dilaksanakan PPTK
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi Camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dapat memudahkan pelaksanaan tugas	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Adanya dukungan dan kebijakan dari pemerintah pusat untuk melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah atau kecamatan	Belum dilaksanakan PPTK dan adanya efisiensi

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan diri dan partisipasi dalam program tersebut	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Komunikasi terbuka dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemberdayaan desa	Kurangnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga kerja, dapat menjadi penghambat dalam koordinasi yang efektif
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan	Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu tertentu dalam forum dapat menghambat partisipasi yang merata
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan	Pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan	Persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya	Kolaborasi yang baik antara instansi-instansi terkait
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Semangat kerja sama dari semua	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk

	ketentraman dan Ketertiban Umum	pihak yang terlibat	terkait
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Anggaran dan personel yang cukup untuk menjalankan program ini	Kurangnya Koordinasi PPTK dengan pihalk terkait
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Partisipasi aktif masyarakat dalam program pembinaan ini	Keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Transparansi dalam proses pembinaan dan pengawasan	Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pendekatan yang proaktif untuk memberikan bantuan dan rekomendasi	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	- Kurangnya sumber daya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama yang baik dengan instansi vertikal	Adanya Efisiensi Anggaran

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Melalui Evaluasi Kerja Tribulan IV Tahun 2025 Kecamatan Ngronggot, diharapakan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanaka dengan capaian kinerja danj Realisasi anggaran yang dicapainya.

Program dan Kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Kecamatan Ngronggot dalam pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi kecamatan. Dalam melaksanakan Program dan kegiatan tersebut tudak lepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu memerlukan evaluasi berkala untuk memperoleh target yang diharapkan

4.2. Tindak Lanjut

Dengan adanya evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV pada tahun 2025, maka dapat diketahui bahwa untuk kedepannya dalam melakukan perencanaan khususnya pada target yang akan ditentukan agar lebih baik lagi sehingga dapat tepat sesuai dengan yang di inginkan.

Ngronggot, 12 Januari 2026

CAMAT NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP,S.Sos

Pembina TK I

NIP 19690115 199003 1 008